



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK SIMPAN PINJAM KHUSUS
PEREMPUAN PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN MITRA MANDIRI
KECAMATAN SUNGAI APIT BERDASARKAN SURAT MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR: 414.2/ 1402/ PMD 11 AGUSTUS 2006
TENTANG KEBIJAKAN PELESTARIAN HASIL
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)*



Oleh:

**DESI RATNA
NIM: 11527203057**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi ini berjudul *"Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kelompok Simpan
Pinjam Khusus Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri
Kecamatan Sungai Apit"*

Nama : DESI RATNA
NIM : 11527203057
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setuju untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2020

Pembimbing Skripsi


PERI PIRMANSYAH, SH.MH
NIK.130217120

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul, "PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK MITRA KAMPUNG PANJAM KHUSUS PEREMPUAN PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN MITRA KAMPUNG NEKAMATAN SUNGAI APIT BERDASARKAN SURAT MENTERI DALAM KEMENTERIAN KOMOR: 414.2/ 1402/ PMD 11 AGUSTUS 2006 TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAHAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG NEKAMATAN " yang ditulis oleh :

Nama : Desi Ratna
NIM : 11527203057
Program Studi: Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Desi Ratna, SH., MH
Sekretaris
Desi Ratna, SH., M.Hum
Penguji 1
Desi Ratna, SHL, SH., MH
Penguji 2
Dr. H. Abu Samah, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararag mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Desi Ratna (2020) : *“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 Tentang Kebijakan Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan”*

Pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit dalam pelaksanaan perjanjiannya terdapat beberapa masalah terutama pada masalah keperdataan yang sering terjadi pada perjanjian. Seperti terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit yang tentunya disebabkan oleh beberapa faktor tertentu sehingga terjadi penghambatan pada pelaksanaan perjanjian kredit.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dan apa faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian dilakukan terhadap kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada unit pengelola kegiatan mitra mandiri kecamatan Sungai Apit. Data tersebut penulis kumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka, dengan sumber data primer dan sekunder, kemudian dianalisis terhadap sumber data tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang terdiri dari 2 orang pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit, dan 8 orang masyarakat pemanfaat dana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit tidak berjalan semestinya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian banyak pihak peminjam atau debitur yang melakukan pelanggaran. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit terdapat faktor eksternal yaitu faktor keluarga seperti dana atau uang yang seharusnya dipergunakan untuk modal usaha namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan faktor usaha, usaha yang dijalankan debitur mengalami penurunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah *Subhanallahuwata'ala* Dzat Yang Maha Agung atas segala anugrah dan perlindungan-Nya, nikmat iman, islam, hidup, kekuatan, serta jalan takdir dan keajaiban yang kesempurnaan-Nya takkan mampu tersentuh oleh bahasa. Ucapan syukur kepada Allah *Subhanallahuwata'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini. Salam dan Shalawat tertuju kepada Nabi Muhammad Sallahu'alaihi wassalam yang telah menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan mengucapkan "*Allahumma sholli 'alaa sayyidina Muhammad, wa 'ala alihi sayyidina Muhammad*".

Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 Tentang Kebijakan Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan"** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun terdapat kesulitan dan hambatan yang telah penulis alami selama proses penulisan skripsi ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut berkat kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah *Subhanallahuwata'ala*. Skripsi ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Akhirnya, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas bantuan dan kontribusi yang selama ini diberikan kepada penulis, terutama kepada :

1. Allah *Subhanallahuwata'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa membukakan jalan dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
2. Ayahanda Tercinta Misnin dan Ibunda Tercinta Nurhayati, Kakak Marfu'ah, S.Ab dan Adik Nuratika yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan penulis, memberikan semangat, motivasi, hingga akhirnya penulis berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hal yang sama penulis ucapkan kepada keluarga-keluarga penulis, terima kasih atas doa serta motivasi yang telah diberikan selama ini yang selalu menguatkan penulis dan sampai akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

memberikan kepada penulis kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr.Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Firdaus, SH, MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran beserta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Peri Pirmansyah, SH, MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi yang begitu besar kepada penulis;

7. Ibu Dra. Nurlaili, M.Ag, selaku penasehat akademik yang selalu memberikan pengarahan dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Seluruh karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis.
10. Teruntuk teman baik penulis Auliya Markha Idris, Ghea Gazira, Cut Melisa W.U, Sinta Dahlia Fatmawati, Annisatul Humairah, Dwi Ayuning Bijaksana, Cici Octa Azhari, Aprilia Sri Hijriyani, Halimah, Siti Nuryana, Clara Anggradini, Dinda Yanti, Sri Rahayu Pratiwi yang telah banyak membantu, memberikan arahan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Januari 2020

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

DESI RATNA
NIM. 11527203057

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	18
A. Gambaran Umum Kecamatan Sungai Apit.....	18
1. Letak dan Geografis	18
2. Kependudukan.....	20
3. Keadaan Ekonomi Masyarakat.....	21
4. Suku Budaya	21
B. Gambaran Umum Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit.....	22
1. Sejarah Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit.....	22
2. Visi dan Misi	23
3. Tujuan dan Fungsi.....	24
4. Struktur Organisasi.....	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Perjanjian	26
1. Pengertian Perjanjian.....	26
2. Bentuk-bentuk Perjanjian.....	27
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	32
4. Unsur-unsur dalam Perjanjian.....	36
5. Wanprestasi Perjanjian.....	37
B. Kredit	39
1. Pengertian Kredit.....	39
2. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	40
3. Bentuk-bentuk Kredit.....	42
4. Penyaluran Kredit.....	46
C. Simpan Pinjam	48
1. Pengertian Simpan Pinjam	48
2. Bentuk-bentuk Kegiatan Simpan Pinjam	48
3. Dasar Hukum Simpan Pinjam	48
D. Tinjauan Umum Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.....	49
1. Sejarah PNPM Mandiri Pedesaan	49
2. Dasar.....	50
3. Surat Tanggung Rentang.....	50
4. Aturan pokok simpan pinjam perempuan (SPP).....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit Berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 Tentang Kebijakan Pelestarian	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.....	54
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit Berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 Tentang Kebijakan Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

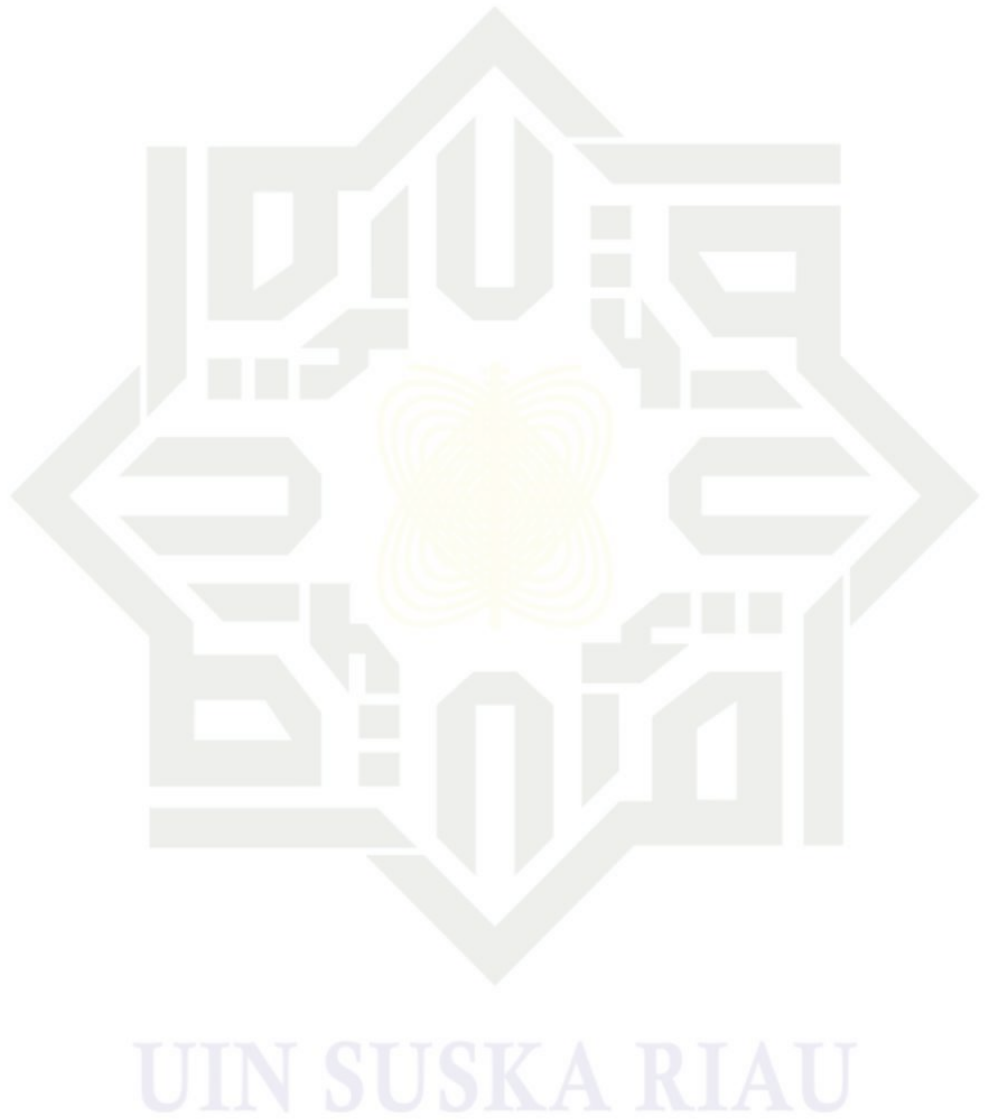
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	12
Tabel 2.1	Luas Kecamatan Sungai Apit.....	17
Tabel 2.2	Jumlah Kepadatan dan Distribusi Penduduk.....	18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Kantor Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit.....	23
------------	---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya perkembangan zaman ternyata kebutuhan manusia semakin banyak. Apalagi dengan naiknya harga barang kebutuhan pokok secara terus menerus, sementara pendapatan tidak bertambah. Hal ini mengakibatkan sebagian besar penduduk dengan penghasilan yang tidak memadai semakin sulit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Akibat lain bila keadaan ini berlangsung secara terus menerus maka jumlah penduduk miskin semakin bertambah.¹

Tujuan atau yang sering disamakan dengan cita-cita bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara definitif tujuan negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-

¹ Dokumen Kantor Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit

² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: telaah tentang pelaku dan kegiatan ekonomi*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2009), h.8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor tertentu. Untuk menggerakkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkannya.

Selanjutnya dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Untuk melaksanakan hal tersebut tidaklah mudah, salah satu faktor yang umum dialami oleh masyarakat adalah faktor permodalan. Dalam kehidupan baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain.³

Banyak lembaga keuangan yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses sumber dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari Bank disebabkan antara lain karena

³Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan Bank menerapkan prinsip prudent banking keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan dan terbatasnya kemampuan permodalan bank itu sendiri.⁴ Hal ini tentu saja menjadi halangan oleh para pelaku usaha yang tidak memiliki dana untuk menjalankan usahanya, apalagi bagi masyarakat desa yang terbelakang keadaan ekonominya.

Oleh sebab itu seiring peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang merupakan kegiatan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun sebagai suatu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka diharapkan bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM-MP mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiologi Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih rinci peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait sistem kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. Ke-2, h. 3.

Usulan yang didanai dalam PNPM-MP dapat diklasifikasikan atas 4

jenis kegiatan yang meliputi:

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek atau pun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat.
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal.
4. Penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) menciptakan lembaga pengelola yang cukup banyak, baik di Desa maupun di Kecamatan salah satunya adalah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini merupakan kegiatan penambahan modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Dana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepada masing-masing anggota kelompok dengan jumlah pinjaman yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok.⁵

Dengan adanya SPP ini masyarakat miskin khususnya merasa sangat terbantu dan dengan adanya SPP yang juga mampu menciptakan Lapangan Kerja bagi masyarakat miskin. Bagi kaum perempuan dapat mengajukan Pinjaman Kredit simpan pinjam perempuan tanpa adanya jaminan yang dibebankan kepada Masyarakat sehingga kaum perempuan mampu memotivasi diri untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan sendirinya.

Sasaran pemberian dana adalah berbentuk kelompok yaitu:

1. Kelompok simpan pinjam yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota rumah tangga miskin.
2. Kelompok usaha bersama adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota rumah tangga miskin (RTM).
3. Kelompok aneka usaha yaitu kelompok yang anggotanya rumah tangga miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual.

Pengelolaan dana SPP hanya digunakan untuk kegiatan SPP seperti halnya diperuntukan sebagai modal usaha kegiatan kaum perempuan yang dimulai melalui tahap perencanaan hingga pada tahap pertanggung jawaban.

⁵ Syarifa Mahila, *Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan pada Um Pengelola Kegiatan PNPM MP Kecamatan Mendahara*, Jurnal Universitas Batanghari Jambi, Vol. 13, No.14 Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program PNPM-MP ini merupakan program nasional yang telah diterapkan diberbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Siak, dan salah satunya termasuklah Kecamatan Sungai Apit sebagai penerima manfaat dari program ini. Dengan melalui program ini pemerintah Kabupaten Siak maupun pemerintah pusat berharap dapat memberikan dampak positif khususnya terhadap penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan kegiatan SPP ini dalam memberikan pinjaman dana usaha kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak, perjanjian antara SPP dan masyarakat pemanfaat dana ini merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengaturan mengenai perjanjian dapat ditemukan dalam sebagian dari buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu yang secara khusus diatur mulai dari Pasal 1313 yang berbunyi:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁶

Kemudian pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dipertegas tentang tanggung jawab kedua belah pihak yang telah sepakat mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, pasal 1338 menyebutkan bahwa:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁷

⁶ Soebekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), C 38, Ke-38, h. 338.

⁷ *Ibid*, h. 342.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan perjanjian seperti ini berlaku pula pada pelaksanaan perjanjian SPP kepada masyarakat pemanfaat dana usaha yang telah mereka sepakati sebelum pencairan dana usaha tersebut.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian antara SPP dengan masyarakat pemanfaat dana usaha jelas disebutkan pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa:

“Atas kredit tersebut dikenakan bunga 1,17 % tetap perbulan (14 % setahun) dari total dana pinjaman. Kedua belah pihak telah ada kesepakatan untuk menggunakan sistem bunga tetap perbulan dan kedua belah pihak menyatakan telah memahami pendanaannya dalam bunga tetap.”

Pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa:

“Pihak kedua dan pemberi kuasa mengerti dan bahwa bunga pinjaman yang dibayar akan dipergunakan untuk biaya pelayanan dan pengelolaan yang dehat serta pemupukan modal dana pinjaman berguliran milik bersama agar dapat berkembang dan lestari sebagai sumber kredit yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa.”

Pasal 2 ayat 4 dijelaskan bahwa:

“Kredit akan dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan cara angsuran bulanan yaitu pokok kredit sebesar, ditambah bunga, pada setiap tanggal: sampai lunas, sebagaimana jadwal angsuran terlampir. Apabila disepakati periode pembayaran angsuran yang lebih panjang dari sebulan, maka pihak kedua dan para pemberi kuasa wajib membayar bunga kredit setiap bulan dari sisa pokok kreditnya.”

Namun pada kenyataannya dimana dalam suatu perjanjian kredit pihak debitur atau peminjam sering lalai atau mengembalikan pinjaman tidak sesuai jadwal dan terkadang nasabah tidak mau membayar dalam mengembalikan pinjaman modal usahanya sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal inilah yang menjadi kendala dalam proses pemberian kredit terhadap masyarakat, sehingga tidak jarang terjadi kemacetan dalam hal pengembalian pinjaman modal usaha, yang justru akan merugikan pihak peminjam itu sendiri. Dalam KUHPerdara sering diistilahkan dengan istilah wanprestasi sebagai bentuk cedera janji atau pelanggaran terhadap kewajiban yang semestinya dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban atau dikenal dengan istilah debitor.⁸

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan perjanjian kredit ini dalam bentuk skripsi hukum dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN MITRA MANDIRI KECAMATAN SUNGAI APIT BERDASARKAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 414.2/ 1402/ PMD 11 AGUSTUS 2006 TENTANG KEBIJAKAN PELESTARIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11

⁸ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 170



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah di uraikan di bagian latar belakang dan batasan masalah maka rumusan masalah yang akan di teliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada unit pengelola kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada unit pengelola kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada unit pengelola kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat Menteri dalam Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada unit pengelola kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum, terutama tentang pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada unit pengelola kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan .
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ataupun sumber informasi bagi penulis dan kalangan akademisi lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama dan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membandingkan permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Maka penulis uraikan unsur-unsur metode penelitiannya sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung turun lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.¹⁰

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada narasumber dengan pendekatan efektifitas. dengan pendekatan efektifitas dari penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala atau untuk

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 2

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-12, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pada kantor unit pengelola kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, karena pada unit pengelola kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit diduga ada permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit simpan pinjam kepada masyarakat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pengelola unit pengelola kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit dan masyarakat pemanfaat dana. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada unit pengelola kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah, pengelola unit pengelola

¹¹ Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Cet. Ke 4, h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan simpan pinjam khusus perempuan dan masyarakat pemanfaat dana.

Sedangkan sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹² Adapun teknik memilih sebagian kecil dari keseluruhan objek penelitian, biasa disebut dengan teknik sampling.¹³ Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel tertuju kepada orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang penulis inginkan.

Untuk lebih jelasnya metode ini adalah pengambilan responden dengan sengaja menentukan sendiri yang dianggap tahu. Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Ketua dan Pegawai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit.	4	2	50%
2.	Nasabah	80	8	10%
	Jumlah	84	10	11,9 %

Sumber Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.¹⁴ Berupa data hasil dari metode pengamatan

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),

¹³ Suratmo, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 88.

¹⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pustaka, 2010), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(observasi) ataupun wawancara yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

- b. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari literatur tentang teori-teori hukum. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data-data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian internasional.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti pendapat-pendapat ahli yang memuat jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur hukum serta berbagai hasil internet dengan menyebut isinya.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus atau ensiklopedia yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan atau melanjutkan suatu penelitian.¹⁵ Yakni dengan melakukan pengamatan langsung pada tempat penelitian.

- b. Wawancara, merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti.¹⁶
- c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa data yang penulis gunakan adalah analisa data kualitatif, yang merupakan cara menghasilkan penelitian deskriptif yaitu segala hal yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan serta mengamati perilaku subjek yang diteliti.¹⁷ Dengan analisa data kualitatif ini penulis melakukan pengamatan langsung lokasi penelitian, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, penulis harus menganalisa sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

¹⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 24.

¹⁶ *Ibid*, h. 24.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, *Op.Cit.*, h. 32.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau F Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian tentang: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini memuat mengenai gambaran umum tentang Kecamatan Sungai Apit, Demografis Kecamatan Sungai Apit, gambaran umum Unit Pengelola Kegiatan (UPK), visi dan misi UPK, tugas dan wewenang UPK dan struktur organisasi UPK.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan diuraikan pengertian-pengertian, dan teori-teori mengenai perjanjian, simpan pinjam dan gambaran umum program nasional pemberdayaan masyarakat untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memuat hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada unit pengelola kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada unit pengelola kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sungai Apit

1. Letak dan Geografis

Kecamatan Sungai Apit terletak antara 1°14' - 0°34' LU dan 102°03'-102°53'BT. Luas wilayah mencapai 1.346,33 km² yang berarti 15,74 persen wilayah Kabupaten Siak yaitu 8.556,09 km² dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Dayun
- d. Sebelah Timur dengan Kabupeten Bengkalis¹⁸

Terbentuknya Kecamatan Sungai Apit, yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Siak, merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya. Pemerintah Kecamatan Sungai Apit sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis yang kemudian terpisah menjadi wilayah kecamatan di Kabupten Siak berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999. Potensi yang ada

¹⁸Dokumen Kecamatan Sungai Apit dalam Angka, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di kecamatan ini secara tidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah yang lama.

Kecamatan Sungai Apit kemudian dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Apit dan kecamatan Sabak Auh yang dilaksanakan pada Tahun 2006. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam kecamatan menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintah kecamatan. Seiring dengan pertambahan penduduk di Kecamatan Sungai Apit, yang pada awal pemekaran terdiri 12 desa, maka sesuai dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2006 berubah menjadi 1 Kelurahan dan 14 Desa.

Tabel 2.1
Luas Kecamatan Sungai Apit

No	Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Jarak (km)
1	Teluk Mesjid	5.030	8
2	Parit I/II	10.000	1
3	Kel. Sungai Apit	10.093	1
4	Tanjung Kuras	12.960	5
5	Sungai Kayu Ara	6.106	5
6	Lalang	9.064	13
7	Mengkapan	11.327	26
8	Sungai Rawa	24.740	50
9	Penyengat	43.732	80
10	Teluk Lanus	55.000	122
11	Harapan	1.670	3
12	Teluk Batil	1.050	5
13	Bunsur	6.150	12
14	Kayu Ara Permai	6.280	4
15	Rawa Mekar Jaya	16.803	48
Jumlah		220.005	

Sumber: Kecamatan Sungai Apit Dalam Angka, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kependudukan

Aspek penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam terbentuknya sebuah kota. Penduduk di Kecamatan Sungai Apit tersebar dilima belas kelurahan / desa. Jumlah penduduk Kecamatan Siak setiap tahunnya terus bertambah seiring dengan bertambahnya pusat-pusat kegiatan di Kecamatan Sungai Apit.

Tabel 2.2
Jumlah Kepadatan dan Distribusi Penduduk

No	Desa/ kelurahan	Luas Wilayah (km)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per-Km
1	Teluk Mesjid	50,3	2.540	50,5
2	Parit I/II	100	1.556	15,56
3	Kel. Sungai Apit	100,93	7.364	73
4	Tanjung Kuras	129,6	1.357	10,5
5	Sungai Kayu Ara	61,06	1.903	31,2
6	Lalang	90,64	1.784	19,7
7	Mengkapan	113,27	2.560	22,6
8	Sungai Rawa	247,4	1.021	4,1
9	Penyengat	437,32	1.419	3,2
10	Teluk Lanus	550	1.624	3,0
11	Harapan	16,7	1.310	78,4
12	Teluk Batil	10,5	1.510	143,8
13	Bunsur	61,5	1.297	21,1
14	Kayu Ara Permai	62,8	993	15,8
15	Rawa Mekar Jaya	168,03	827	4,9
Jumlah		2.200,05	29.065	

Sumber: Kecamatan Sungai Apit Dalam Angka, 2018

Berdasarkan Tabel 2.2 menjelaskan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kecamatan Sungai Apit dengan jumlah penduduk sebanyak 29.065 jiwa dengan luas 2.200,05 km² kepadatan penduduknya 497,36 jiwa/km². Jumlah penduduk terpadat berada di Desa Teluk Batil dengan jumlah penduduk 1.510 jiwa dengan kepadatan penduduk 143,8 jiwa/km².

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Sebagai kawasan yang terletak di pinggiran sungai, kehidupan sungai mempengaruhi pola kehidupan dan mata pencaharian penduduk di Kecamatan Sungai Apit. Penduduk Melayu yang bertempat di pinggiran Sungai Siak memanfaatkan sungai sebagai sumber nafkah dan sumber bagi kehidupannya. Mayoritas penduduk yang berada di pinggiran sungai berprofesi sebagai nelayan dan jasa angkut transportasi sungai. Permukiman mereka yang berada di sepanjang pinggir sungai memiliki dermaga yang berfungsi untuk menyandarkan alat transportasi sir yang mereka miliki.

Pada kawasan pinggir sungai terdapat kawasan pelabuhan berupa dermaga yang terbentuk sesuai dengan aktivitas ekonomi yang ditimbulkan. Dermaga tersebut berfungsi untuk bongkar muat barang, dermaga untuk jasa transportasi sungai dan dermaga untuk nelayan.

4. Suku Budaya

Kecamatan Sungai Apit hampir seluruh desa berada di daerah aliran sungai yaitu, Sungai Siak pada kawasan permukiman pinggiran Sungai Siak terdapat dua pengelompokan etnis masyarakat, yaitu suku Melayu yang merupakan penduduk yang pertama kali menempati kawasan ini dan masyarakat etnis Tionghoa, Jawa, Minang dan Batak sebagai kelompok masyarakat pendatang. Pengelompokan etnis ini juga berpengaruh terhadap bentuk hunian pada kawasan ini. Masyarakat Melayu tampilan bangunan dominan berbentuk eumah panggung dan pola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebar sedangkan masyarakat etnis Tionghoa yang mendominasi kawasan pasar berbentuk kawasan berderet dan tertata hal ini dikarenakan fungsi bangunan sebagai hunian dan toko.

Agama adalah salah satu unsur penting dalam pengaturan budaya lingkungan. Hal ini ditandai dengan peletakan tempat peribadatannya. Masjid bagi tempat peribadatan umat muslim terdapat di sekitar permukiman yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sedangkan terdapat kelenteng pada kawasan perdagangan di tempat bermukim etnis Tionghoa. Sementara gereja sebagai tempat beribadat umat Kristiani jauh dari darah kecamatan di karenakan umat Kristiani yang sedikit.

B. Gambaran Umum Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit

1. Sejarah Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sumgai Apit

Kantor Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdiri pada Tahun 2007. UPK ini telah mengelola dana program yang diterima dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) dan disalurkan langsung kepada masyarakat untuk kegiatan pembangunan, prasarana desa, kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) dan simpan pinjam perempuan (SPP), kegiatan pendidikan dan kesehatan. Untuk kesehatan seperti posyandu yang ada desa Rawa Mekar Jaya, desa kayu Ara Permai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program pembangunan, prasarana desa, kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP), kegiatan pendidikan dan kesehatan berakhir sejak tahun 2014. Saat ini program UPK hanya bergerak dibidang simpan pinjam perempuan saja dan sudah direalisasi keseluruh desa di Kecamatan Sungai Apit. UPK ini sudah terakta dan sudah memiliki kantor sendiri yang terletak di Jalan Hangtuh Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Unit Pengelola Kegiatan adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian melalui bantuan untuk kelompok usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP).¹⁹

2. Visi dan Misi

Visi Unit Pengelola kegiatan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, khususnya masalah kemiskinan.

Misi Unit Pengelola Kegiatan :

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
- c. Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal;

¹⁹Dokumen Kantor Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
- e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

3. Tujuan dan fungsi

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya bantuan dana diharapkan masyarakat secara umum dan anggota kelompok pada khususnya dapat:

- a. Meningkatkan kesejahteraan
- b. Mengurangi jumlah pengangguran
- c. Mengurangi anak putus sekolah
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan
- e. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat

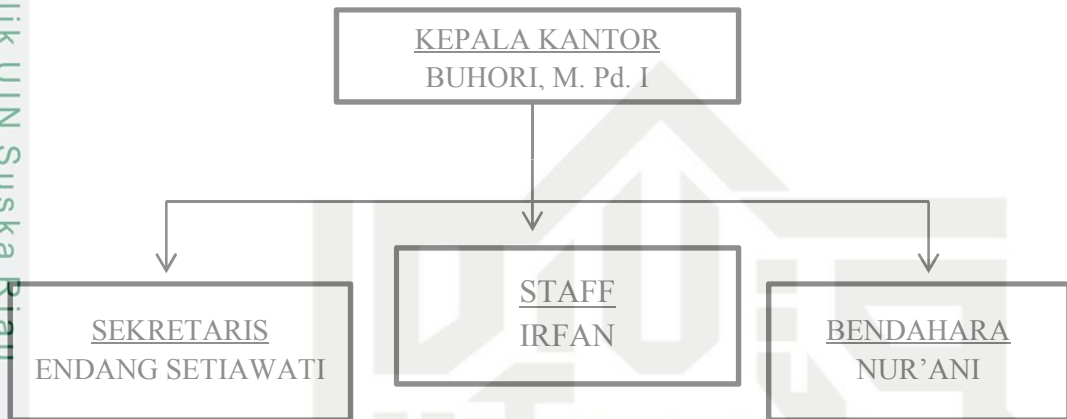
Manfaat yang akan diperoleh:

- a. Terjaganya kelangsungan usaha yang telah ada
- b. Terciptanya lapangan kerja baru
- c. Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil produksi
- d. Meningkatnya perilaku hidup/derajat kesehatan.
- e. Menurunnya angka putus sekolah.

4. Struktur Organisasi

Gambar 2.1

Struktur Kantor Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam KUHPdata diatur dalam Buku ke III tentang perikatan bab kedua. Pasal 1313 KUHPdata memberikan rumusan tentang “perjanjian” sebagai berikut : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum akan menimbulkan hubungan hukum atau yang lazim disebut dengan istilah perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum perikatan muncul karena adanya perbuatan hukum perikatan. Pada saat para pihak menandatangani perjanjian, para pihak sedang melakukan perbuatan hukum sehingga setelah perjanjian itu ditandatangani maka para pihak terikat satu sama lain hubungan hukum perikatan. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya perjanjian dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Perbedaan dengan perundang-undangan adalah dalam hal bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja dan tidak mengikat pihak lain atau masyarakat umum, sedang kan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang undangan berlaku umum kepada semua pihak yang menjadi subjek pengaturannya.²⁰

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²¹

2. Bentuk-bentuk Perjanjian

a. Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang dinyatakan oleh satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak, yaitu pihak yang memiliki hak tagih yang dalam bahasa bisnis disebut pihak kreditur, dan pihak yang dibebani kewajiban yang dalam bahasa bisnis disebut debitur. Contoh perjanjian sepihak adalah “hibah” yang diatur dalam pasal 1666 KUHPerdara dan wasiat (testament) yang diatur dalam pasal 875 KUHPerdara.²²

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan Atas Beban

Kedua jenis perjanjian ini diatur dalam pasal 1314 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri, suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang

²⁰ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: mitra wacana media, 2012), h.34

²¹ P. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 4.

²² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. Ke-2, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

c. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Mengenai kedua jenis perjanjian ini terdapat dalam pasal 1319 KUHPerdara, bahwa:

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal, dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terdapat dua macam perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus yang dapat disebut sebagai perjanjian bernama (Benoemde). Adapun perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, yang dapat disebut sebagai Perjanjian Tidak Bernama (onbenoemde).²³

d. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, dimana apabila mereka telah mencapai persesuaian (persetujuan) kehendak untuk mengadakan perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat bagaikan undang-undang bagi mereka.

Mengenai perjanjian Riil terjadi sebaliknya, yaitu perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya

²³ Ibid, h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian penitipan barang yang diatur dalam pasal 1694 KUHPerdara yang berbunyi “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”. Contoh lainnya adalah perjanjian pinjam pakai yang diatur dalam pasal 1740 KUHPerdara yang menegaskan bahwa:

“Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya, untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang itu, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya”.

e. Perjanjian Obligatior dan Kebendaan

Perjanjian obligatior adalah perjanjian yang hanya menyoalkan kesepakatan para pihak untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Hal ini dianut dalam system KUHPerdara. Misalnya dalam jual beli, walau telah tercapai consensus antara penjual dengan pembeli tentang barang dan harga, belumlah mengakibatkan beralihnya hak milik atas benda itu dari tangan penjual ke tangan pembeli.

Untuk itu diperlukan perjanjian kebendaan, yaitu suatu perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, atau suatu perjanjian yang membebaskan kewajiban pihak, untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. Penyerahan itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Perjanjian Formal

Perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang tidak hanya harus memenuhi asas consensus, tetapi juga harus dituangkan dalam suatu bentuk tertentu atau harus disertai dengan formalitas tertentu. Contoh: Perjanjian kuasa pembebanan hak tanggungan. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk autentik yang dibuat di hadapan Pejabat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris.

g. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian liberatoir atau perjanjian yang menghapuskan perikatan adalah perjanjian antara dua pihak yang isinya adalah untuk menghapuskan perikatan yang ada antara mereka. Contohnya disebutkan dalam pasal 1438 KUHPerdta yang menyatakan bahwa:

“Pembebasan suatu hutang tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”. Contoh lainnya diatur dalam pasal 1442 KUHPerdta : “Pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut perjanjian, yang diberikan kepada siberutang utama membebaskan para penanggung utang”.

h. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian yang memuat keinginan para pihak untuk menetapkan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak kelak. Didalam perjanjian itu dapat juga ditetapkan kekuatan pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh pihak-pihak terhadap alat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti tertentu. Misalnya tanda terima uang yang sulit untuk ditemukan maka seringkali para pihak dalam perjanjian itu menentukan bahwa perjanjian-perjanjian yang mereka tutup mengandung pernyataan adanya pembayaran, dan mereka mengakui mempunyai kekuatan (alat bukti) juga sebagai kuitansi (tanda terima uang).

i. Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang prestasi atau objeknya ditentukan kemudian. Hal ini dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 1774 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perjanjian yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian penanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dari pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang”.*²⁴

j. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mempunyai ciri-ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama. Jenis perjanjian ini tidak diatur dalam undang-undang, tetapi didalamnya mempunyai nama sendiri, yang unsur-unsurnya mirip atau sama dengan unsur-unsur perjanjian bernama, yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa sehingga tak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri. Contohnya: perjanjian sewa beli. Didalam perjanjian ini terdapat beberapa unsur perjanjian bernama yaitu sebagai berikut:

²⁴Ibid, h. 55

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- #### k. Perjanjian Garansi

Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak menjamin pihak lain (orang ketiga) yang ada diluara perjanjian bahwa lawan janjinya akan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan terhadap pihak lain (orang ketiga) itu, dan kalau sampai lawan janjinya itu tidak berprestasi maka ia bertanggung jawab untuk itu.²⁶

3. Syarat sah nya perjanjian

Syarat syahnya Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

²⁵*Ibid*, h. 56

²⁶*Ibid*, h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata meliputi:

- 1) Anak di bawah umur
- 2) Orang dalam pengampuan; (Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan)
- 3) Orang-orang perempuan, Dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (istri).

- c. Suatu hal Tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti aka nada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
- 2) Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dapat ditentukan jenisnya.
- 4) Barang yang akan datang.
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Kebebasan berkontrak.
- 2) Kebebasan konsensualitas.
- 3) Kebebasan personalia.²⁷

Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian atau kontrak yang berlaku umum tetapi diatur diluar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan itikad yang benar –benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
- 2) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan

²⁷ Gunawan Widjaja, *Ahmad Yani, Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.

- 3) Kontrak harus dilakukan berdasarkan atas kepatuhan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
- 4) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.²⁸

Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatuhan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut berupa:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan
- 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian

²⁸ Munir Fuady, *pengantar Hukum Bisnis*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Terlambat dalam kewajiban perjanjian
- 4) Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.²⁹

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai dipengadilan.³⁰

Dalam pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang", ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antar dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.³¹

4. Unsur-unsur dalam perjanjian

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur esensial

Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial

²⁹ Joko Trianto, *Hubungan Kerja di perusahaan jasa konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 61

³⁰ *Ibid.*

³¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya. Unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu ada dalam perjanjian. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan.

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur perjanjian yang ditambah oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal tertentu sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

5. Wanprestasi perjanjian

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³² Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.³³

³² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), h. 180.

³³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³⁴

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.³⁵

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.³⁶

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dapat disesalkan.

³⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.Cit.*, h. 146

³⁵ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

³⁶ *Ibid*, h. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Kredit

1. Pengertian kredit

Kata Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberi kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang di pinjamkan pasti kembali.

Menurut Anwar kredit merupakan pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu kepada pihak lain dan prestasinya akan dikembalikan lagi dalam jangka waktu tertentu beserta uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa). Sedangkan menurut Hasibuan menjelaskan bahwa kredit ialah semua jenis pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang disepakati bersama.

³⁷ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kasmir menyatakan bahwa kredit adalah suatu pembiayaan yang bisa berupa uang ataupun tagihan yang nilainya bisa ditukar dengan uang.

Pengertian kredit menurut undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁸

2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak di capai yang tentunya tergantung dari tujuan Bank itu sendiri. Dalam prakteknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut :

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Bagi bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan Bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan) Oleh karena itu sangat penting bagi Bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional Bank juga relative cukup besar.

³⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-5, 72-73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

- c. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah di berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor riil. Adapun fungsi kredit secara umum antara lain:

- 1) Meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Kemudian kredit juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada si pemilik dana.

- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

a. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara, si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.³⁹

3. Bentuk-bentuk Kredit

Secara Umum jenis- jenis kredit dilihat yang salurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi yaitu:

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

- 1) Kredit Investasi yaitu kredit yang biasanya di gunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru

³⁹ Ibid, h. 105-108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau untuk rehabilitas di mana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relative lebih lama.

- 2) Kredit modal kerja yaitu kredit yang di gunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja di berikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan produksi perusahaan.

b. Dilihat dari segi Tujuan Kredit

- 1) Kredit produktif yaitu kredit yang di gunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini di berikan untuk meningkatkan barang atau jasa. Artinya kredit ini di gunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan barang atau jasa.
- 2) Kredit konsumtif yaitu kredit yang di gunakan untuk di konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang atau jasa yang di hasilkan, karena memang untuk di gunakan atau di pakai oleh seseorang atau badan usaha.
- 3) Kredit pertambangan yaitu kredit yang di gunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan atau pembayarannya di harapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Kredit ini sering di berikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- 2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.
- 3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang masa pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan atau kredit konsumtif atau kredit perumahan.

d. Dilihat Dari Segi Jaminan

- 1) Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- 2) tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Dilihat dari segi sektor Usaha

- 1) Kredit Pertanian, Merupakan kredit yang di biaayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor uasaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya jangka pendek peternakan ayam dan janka panjang kambing atau sapi.
- 3) Kredit Industri, yaitu kredit untuk mebiayai industri kecil, menengah atau besar .
- 4) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang di biayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- 5) Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang di berikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, di berikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.⁴⁰

⁴⁰ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), C. Ke6, h. 99-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyaluran Kredit

- a. Perencanaan, penyaluran kredit

Perencanaan penyaluran kredit harus dilakukan secara realitas dan objektif, agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai. Perencanaan penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat kesehatan bank dan likuiditas bank. Jelasnya, rencana penyaluran kredit harus seimbang dengan rencana penerimaan dana. Kedua rencana ini harus dihitung secara terpadu oleh perencana secara baik dan benar. Prosedur penyaluran kredit menjadi tugas dan tanggung jawab dari departemen (bagian) pemasaran suatu bank.

- b. Syarat- syarat Karyawan Bagian Kredit.

Dalam penyaluran kredit, profesionalitas karyawan sangat di butuhkan. Untuk itu di butuhkan karyawan bagian kredit.

- 1) Jujur dan bermoral baik, serta ahli di bidang pekreditan
- 2) Adil dalam memberikan pelayanan terhadap serous nasabahbank
- 3) Mengetahui hokum - hukum perjanjian dan perikatan aguna kredit
- 4) Menggunakan syarat -syarat yang boleh di terima
- 5) Objektif dalam penialain agunan kredit yang boleh di berikan pada nasabah
- 6) Berpegang teguh lugs tentang nilai ekonomi agunan kredit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Mengetahui ketetapan dan Surat edaran Bank Indonesia tentang perkreditan Bank.

c. Prosedur Penyaluran Kredit

Prosedur yang harus di penuhi dalam penyaluran kredit, antara lain:

- 1) Calon Debitor menulis Nama, Alamat, Aguanan, dan jumlah kredit yang di inginkan pada formulir aplikasi permohonan kerdit.
- 2) Calon debitur mengajukan jenis kredit yang di inginkan
- 3) Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau legel leding limit (L3) atau BMPK nya
- 4) Jika BMPK di setuju nasabah, akad (perjarjjian kredit) di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

d. Alokasi penyaluran Kredit

Alokasi penyaluran kredit harus berpedoman pada ketetapan dan surat edaranotoriter moneter Bank Indonesia sebagai berikutnya :

- 1) Pemilik Bank (pernegang saham) mendapatkan maximal 20 % dari jumlah kredit yang di salurkan Bank berangkatutan.
- 2) KUK / KUT mendapatkan 20 ONO dari jumlah kredit yang di salurkan Bank.
- 3) Masyarakat lugs (di luar 1 dan 2) sebanyak 60 % dari jumlah kredit yang di berikan, disalurkan kepada sektor -sekrot perkonomian, pertanian, pertambangan, dan perdagangan.
- 4) Kredit rekening Koran dan kredit bejangka.⁴¹

⁴¹ Melayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT . Bumi Aksara, 2005), Cet. Ke-4, h. 90 – 92.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C Hak Cipta Simpan Pinjam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Simpan Pinjam

Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi yang utama ditentukan dalam undang-undang adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran.⁴²

2. Bentuk kegiatan simpan pinjam

Adapun bentuk kegiatan simpan pinjam adalah:

- Anggota atau pemanfaat melakukan pinjaman
- Melakukan usaha dengan memanfaatkan dana sebagai penambahan permodalan bentuk usaha anggota atau pemanfaat sehingga mampu berkembang
- Anggota atau pemanfaat melakukan pengembalian dana
- Anggota atau pemanfaat mampu melakukan pengembangan pada bentuk usahanya.

3. Dasar hukum simpan pinjam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012

⁴² <http://www.google.com>, *Pelaksanaan Simpan Pinjam*, diakses pada tanggal 2 November 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Perkoperasian. Koperasi simpan pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi. Berdasarkan Pasal 44 UU Perkoperasian dan penjelasannya telah diatur bahwa: "Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam." Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut dilaksanakan dan untuk :

- a. anggota koperasi yang bersangkutan
- b. calon anggota yang memenuhi syarat
- c. Koperasi lain atau anggotanya

Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi Koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu ataupun satu-satunya kegiatan usaha koperasi, sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas. Kegiatan usaha ini banyak menanggung resiko, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional.

Gambaran Umum Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan

1. Sejarah PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung dibawah koordinasi PNPM Mandiri.⁴³

Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.

2. Dasar

Surat mendagri nomor: 414.2/1402/pmd 11 agustus 2006 Tentang Kebijakan Pelestarian Hasil Pnpm Mpd

3. Surat Tanggung Rentang

Surat tanggung rentang (STR) yaitu pernyataan dari semua anggota kelompok, yang pada intinya akan menanggung secara rentang atau bersama-sama bila terjadi penunggakan angsuran kelompok yang disebabkan oleh beberapa anggota ataupun oleh salah satu anggota kelompok.

⁴³ Turmuzi, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat*, Jurnal, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Aturan pokok simpan pinjam perempuan (SPP)

- 1) Syarat Dan Ketentuan Kelompok Yang Berhak Mengajukan Usulan Pinjaman:

Kelompok yang berhak mengajukan usulan pinjaman kelompok adalah kelompok yang telah memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit.

Adapun ketentuan kelompok simpan pinjam perempuan yang telah telah memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Pinjaman hanya diberikan kepada kelompok dan bukan atas nama perseorangan.
- b) Pribadi-pribadi yang menerima pinjaman dari UPK melalui kelompok adalah anggota kelompok yang bersangkutan dan diutamakan dari golongan Rumah Tangga Miskin (RTM).
- c) Kelompok harus sudah mempunyai pengurus kelompok dan anggota minimal 10 orang yang bertempat tinggal serta merupakan penduduk desa yang sama Pengurus kelompok mempunyai kemampuan mengelola kegiatan SPP.
- d) Kelompok sudah memiliki aset/harta yang digunakan sebagai modal kegiatan kelompok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Kelompok mempunyai administrasi dan pembukaan yang baik.
 - f) Anggota kelompok sebagian mempunyai usaha dan/atau sumber pendapatan.
 - g) Kelompok sedang tidak mempunyai tunggakan pinjaman dan/atau masalah, baik dengan UPK maupun dengan pihak lain.
 - h) Kelompok yang masih mempunyai pinjaman di UPK dan pinjaman tersebut belum lunas, kelompok yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk mengajukan usulan pinjaman kepada UPK agar bisa ikut proses verifikasi dan proses pembahasan dalam forum MAD dengan bertujuan untuk kesinambungan kegiatan SPP.
- 2) Usulan permohonan peminjaman kelompok meliputi:
- a) Proposal pinjaman
 - b) Rencana kegiatan kelompok
 - c) Daftar penerima manfaat dan besar pinjaman
 - d) Berita acara musyawarah kelompok untuk menentukan peminjam dan besar pinjaman kelompok
 - e) Profil kelompok
 - f) Surat pengantar dan rekomendasi dari penghulu/lurah
 - g) Rencana kegiatan kelompok
 - h) Surat pernyataan tanggung renteng
 - i) Foto peminjam
 - j) Kartu tanda penduduk/identitas peminjam
 - k) Surat persetujuan dari suami atau ahli waris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Verifikasi usulan permohonan kelompok

Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke UPK untuk diadministrasikan, kemudian BKAD menugaskan tim verifikasi untuk melaksanakan verifikasi usulan.

4) Jumlah pinjaman kelompok

Jumlah pinjaman kelompok simpan pinjam perempuan ditentukan dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.

5) Besarnya denda yang dibebankan kepada kelompok yang menunggak adalah $2\% \times \text{pokok tunggakan}$, Denda efektif diberlakukan satu minggu setelah jatuh tempo, Jika lamanya waktu menunggak sudah memenuhi kriteria pinjaman bermasalah maka akan diberlakukan penanganan secara khusus yaitu penyehatan pinjaman bermasalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian, banyak pihak peminjam atau debitur yang melakukan penunggakan atau tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman setiap bulan kepada pihak Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ PMD 11 Agustus 2006 tentang kebijakan pelestarian hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terdapat faktor eksternal yaitu, 1. Faktor keluarga, seperti dana atau uang yang seharusnya dipergunakan untuk modal usaha namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 2. Faktor usaha, usaha yang

dijalankan debitur mengalami penurunan omset karena berbagai hal seperti anggota yang telah melakukan pembyaran angsuran yang disetorkan melalui Ketua Kelompok SPP, tetapi Ketua Kelompok SPP tersebut tidak menyetorkan kepada pihak UPK (terjadinya penyelewengan), persaingan usaha, manajemen usaha yang tidak baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang di lakukan, penulis mengajukan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Bagi pengurus UPK diharapkan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit diperketat lagi kepada kelompok-kelompok SPP penerima yang ingin melakukan pinjaman dana, dilihat betul-betul mana kelompok yang memang bisa berkembang dengan melihat usaha yang ingin dijalankannya.
2. Mengenai faktor penghambat yang menyebabkan pinjaman itu bermasalah baiknya pihak UPK melihat dulu usaha yang ingin dijalankan oleh anggota kelompok SPP apakah usaha itu menjanjikan keuntungan bagi anggota kelompok atau tidak, jangan asal meloloskan kelompok-kelompok yang ingin meminjam dana tanpa memikirkan resiko kedepannya, dan juga diharapkan pihak UPK sebelum memberikan dana bergulir kepada kelompok SPP baiknya melakukan pelatihan-pelatihan mengenai kewirausahaan yang nantinya dapat menjadi tambahan ilmu bagi anggota SPP dengan begitu mengurangi resiko kegagalan usaha yang mereka jalankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Akhiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Burhanuddin S, *Prosedur mudah mendirikan Koperasi*, Jakarta: Yustisia, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. Ke-5.
- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cet. Ke-2
- Joko Trianto, *Hubungan Kerja di perusahaan jasa kontruksi*, Bandung: Mandar Maju. 2004.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta:Bumi Aksara, 2007, Cet. Ke 4.
- Melayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005
- Muhammad Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 2005
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: telaah tentang pelaku dan kegiatan ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Poetjawan, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1979



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Soebekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007, Cet. Ke-38.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, Cet. Ke-12
- Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. Ke-2
- Suratmo, Philips dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfadeta, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Undang-Undang:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perpres Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Jurnal:

Syarifa Mahila, *Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM MP Kecamatan Mendahara*, Jurnal Universitas Batanghari Jambi, Vol 13, No.14, 2013

Hamuzi, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat*, Jurnal, 2012

Internet :

<http://www.google.com>, Pelaksanaan Simpan Pinjam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN UNIT PENGELOLA
KEGIATAN MITRA MANDIRI KECAMATAN SUNGAI APIT**

1. Sejak tahun berapa UPK didirikan?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan?
3. Bagaimana prosedur untuk mengajukan pinjaman kepada UPK?
4. Apakah pengajuan persyaratan peminjam ada yang ditolak?
5. Apakah pelaksanaan perjanjian kredit oleh UPK berjalan dengan lancar kepada masyarakat?
6. Apakah pernah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian kredit?
7. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit?
8. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit?
9. Apakah upaya yang dilakukan UPK terhadap peminjam yang melanggar perjanjian kredit ini?

UIN SUSKA RIAU

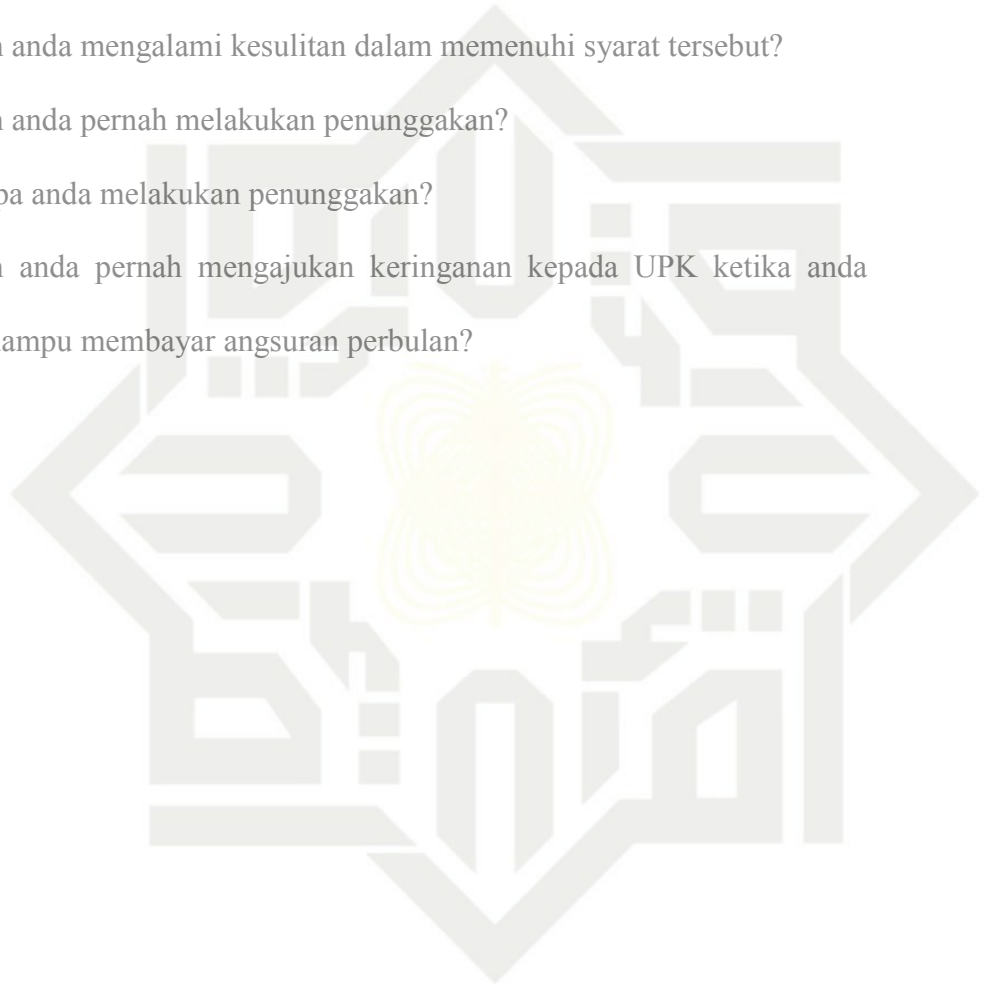


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN

1. Apakah anda mengetahui dan memahami apa yang menjadi syarat-syarat dalam pengajuan pinjaman di UPK?
2. Apakah anda mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat tersebut?
3. Apakah anda pernah melakukan penunggakan?
4. Mengapa anda melakukan penunggakan?
5. Apakah anda pernah mengajukan keringanan kepada UPK ketika anda tidak mampu membayar angsuran perbulan?



UIN SUSKA RIAU



MITRA MANDIRI SUNGAI APIT
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK
Alamat : Jl. Sultan Syarif Kasim

Surat Perjanjian Kredit

No. : /MM-SA/UPK/SPP/ /201
 Tanggal : 201

Sebelum memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta kesadaran akan cita-cita luhur dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kemakmuran bersama, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUHORI, M. Pd.I**
 Jabatan : **Ketua UPK Kec. Sungai Apit**
 Alamat : **Sungai Apit**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus UPK selaku Pengelola Pelayanan Kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pemberdayaan Masyarakat UPK Mitra Mandiri di Kecamatan Sungai Apit, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan

Nama :
 Jabatan : **Ketua Kelompok SPP.....**
 Alamat : **Kampung**
 Nama :
 Jabatan : **Sekretaris Kelompok SPP**
 Alamat : **Kampung**

Dalam halungan ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan anggota-anggota kelompok yang telah memberikan kuasa secara tertulis sebagaimana Surat Kuasa terlampir (Surat Pernyataan Tanggung Renteng) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian kredit ini, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan masing-masing seperti telah diterangkan diatas, pada hari ini : tanggal : - -, Jam : .00 bertempat di :, dengan sadar dan sukarela menyatakan telah membuat perjanjian utang-piutang dengan ketentuan - ketentuan yang disepakati bersama sebagai berikut :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 1

Pihak Pertama setuju memberikan kredit kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp. .000,-

) yaitu jumlah yang telah diputuskan dalam berdasarkan permohonan dari **Pihak Kedua**

dan para pemberi kuasa yang dilakukan secara kelompok sesuai Surat Permohonan

Kredit tanggal :

Ayat 2

Pihak Kedua dan para pemberi kuasa, mengaku telah menerima uang dalam jumlah sebagaimana yang telah diterangkan pada ayat 1 diatas, yang mana telah dibayarkan sesuai jumlah kreditnya masing-masing dan dibuktikan secara sah dengan daftar tanda terima uang terlampir, yang berlaku sebagai Surat Pengakuan Utang, baik perorangan maupun kelompok secara tanggung renteng.

Pasal 2

Kedua belah pihak secara sukarela menerima syarat-syarat perjanjian utang-piutang sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan dibawah ini.

Ayat 1

Dana kredit akan dipergunakan untuk kegiatan usaha guna meningkatkan pendapatan dan mutu kehidupan keluarga. Dengan demikian Kredit ini akan memberikan manfaat sebesar-sebesarnya bagi pertumbuhan ekonomi serta perkembangan seluruh anggota keluarga Pihak Kedua dan para Pemberi kuasa.

Ayat 2

Dana kredit tersebut dikenakan **bunga 1,17% tetap per bulan (14% Setahun)** dari total dana pinjaman. Kedua belah pihak telah ada kesepakatan untuk menggunakan sistem bunga tetap per bulan, dan kedua belah Pihak menyatakan telah memahami dan menyetujuinya dalam **bunga Tetap**.

Ayat 2.a

Apabila pembayaran Pokok kredit dan bunga tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo selama 12 Bulan dan 18 bulan maka kelompok akan diberikan **Rewards sebesar 6% dari Total Alokasi Pinjaman**.

Ayat 2.b

Ketentuan pada Ayat 2.a diatas tidak berlaku apabila melanggar tanggal jatuh tempo sesuai yang telah disepakati.

Ayat 3

Pihak Kedua dan para pemberi kuasa mengerti dan bahwa bunga pinjaman yang dibayar akan dipergunakan untuk biaya pelayanan dan pengelolaan yang sehat serta pemupukan modal dana pinjaman berguliran milik bersama agar dapat berkembang dan lestari sebagai sumber kredit yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa.

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kredit akan dibayar kembali dalam jangka waktu : 12 bulan, dengan cara angsuran bulanan, yaitu **pokok kredit sebesar Rp.**, ditambah **bunga Rp.** setiap tanggal : sampai lunas, sebagaimana jadwal angsuran terlampir. Apabila disepakati periode pembayaran angsuran yang lebih panjang dari sebulan, maka pihak kedua dan para pemberi kuasa wajib membayar bunga kredit setiap bulan dari sisa pokok kreditnya.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Ayat 5

Apabila Pihak kedua dan para pemberi kuasa membayar angsuran dalam jumlah dan waktu yang tidak sesuai dengan yang tertera pada jadwal angsuran, maka pembayaran yang dihitung dengan urutan sebagai berikut : pembayaran kewajiban bunga, pembayaran tunggakan pokok dan baru kemudian kewajiban pembayaran pokok untuk bulan yang berjalan.

Pasal 3

Ayat 1

Pihak pertama berkewajiban mendampingi pihak kedua dan para pemberi kuasa, agar dapat menggunakan dan kreditnya untuk mengembangkan usaha, meningkatkan mutu kehidupan keluarga dan memperbaiki pengaturan keuangan rumah tangga. Dengan demikian, kredit dapat dibayar kembali secara lancar sambil tetap memberi manfaat yang setinggi-tingginya bagi kemajuan ekonomi dan perkembangan seluruh anggota keluarga.

Ayat 2

Pihak kedua dan para pemberi kuasa sadar dan mengerti bahwa mengembalikan kredit secara lancar sesuai jadwal yang telah disepakati, merupakan kewajiban hukum sekaligus menunjukkan budi-pekerti luhur untuk mengembangkan semangat tolong menolong dengan saudaranya sesama warga Desa yang lain. Pengembalian kredit secara lancar akan memperluas kesempatan untuk memperoleh kredit berikutnya serta membuka peluang bagi orang lain mendapatkan giliran pelayanan.

Ayat 3

Apabila terjadi saling selisih berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul atas perjanjian utang-piutang ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Apabila tidak dapat dicapai kata sepakat, kedua belah pihak setuju untuk menunjuk **Pengadilan Negeri : Siak Sri Indrapura** Sebagai upaya hukum menyelesaikan persengketaan tersebut.

Ayat 4

Pihak kedua menyatakan secara sadar dan sukarela telah menanda-tangani akad atau perjanjian kredit ini, setelah terlebih dahulu membacakan isi perjanjian ini kepada para pemberi kuasa dengan sejelas-jelasnya dan tidak seorangpun diantaranya menyatakan keberatan.

Ditanda-tangani di Tanggal,

201

Saksi

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(.....)
Penghulu

(BUHORI, M. Pd.I)
Ketua UPK

(.....)
Sekretaris

(.....)
Ketua

Strategi Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, "PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK KEMUDIAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN MITRA KAWADIRI KECAMATAN SUNGAI APIT BERDASARKAN SURAT MENTERI DALAM KEMENTERIAN NOMOR: 414.2/ 1402/ PMD 11 AGUSTUS 2006 TENTANG KEBIJAKAN KEMENTERIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAWADIRI PEDESAAN" yang ditulis oleh :

Nama : **Desi Ratna**
NIM : **11527203057**
Program Studi: **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : **Selasa, 10 Maret 2020**
Waktu : **13.30 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dekan : **Dr. H. Agus Samah, SH., MH**
Ketua : **Dr. H. Agus Samah, SH., MH**
Sekretaris : **Dr. H. Agus Samah, SH., MH**
Anggota : **Dr. H. Agus Samah, SH., MH**
Anggota : **Dr. H. Agus Samah, SH., MH**

(Handwritten signatures and stamps)

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desi Ratna

NIM : 11527203057

Program Studi : STUDI ILMU HUKUM

Judul : *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ Pmd 11 Agustus 2006 Tentang Kebijakan Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*

Pembimbing : Peri Pirmansyah, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 April 2020

Pimpinan Redaksi



M. Atmi Syahrin, SH., MH., CPI.

NIK. 198804302019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Desi Ratna
NIM	: 11527203057
Tempat/ tanggal lahir	: Sungai Apit, 12 Desember 1996
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Universitas	: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:414.2/1402/PMD 11 Agustus 2006 Tentang kebijakan Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Maret 2020

Yang membuat pernyataan

DESI RATNA
NIM. 11527203057



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8209/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menyatakan bahwa :

Nama : DESI RATNA
NIM : 11527203057
Jurusan : II MU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 3 SEPTEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 15 Oktober 2019
Dekan,



Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarag mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarag mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK
PINJAM KHUSUS PEREMPUAN PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN
MANDIRI KECAMATAN SUNGAI APIT, ditulis oleh saudara :


Nama : DESI RATNA
NIM : 11527203057
Program Studi : Ilmu Hukum
seminarkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa / 13 Agustus 2019
Narasumber : HELEN LAST FITRIANI, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Agustus 2019

Narasumber

Kepala Badan Tata Usaha


Erni, S.S., MM
NIP. 19630226 199103 2 002


Helen Last Fitriani, SH, MH
NIK. 130 217 121



BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

NAMA

NOMOR MAHASISWA

JUDUL USUL PENELITIAN

Hari/Tgl. Diseminarkan

Hasil Seminar dirumuskan adalah

a. Judul

b. Latar Belakang Masalah

c. Permasalahan

d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

e. Kerangka Teoritis (jika ada)

f. Rumusan Hipotesis (jika ada)

g. Metode Penelitian

h. Daftar Pustaka

: Desi Ratna

: 11527203057

: Pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan pada unit pengelolaan kegiatan mitra mandiri kecamatan sei apit

: Selasa / 13 Agustus 2019

: ~~Disetujui~~ / Ditolak / Disempurnakan

: ~~Jelas~~/Masih Kabur/Perlu Perbaikan

: Jelas / Masih Kabur / ~~Dirumuskan~~ kembali agar menjadi jelas

: Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan

: Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan

: Cukup Tajam / Perlu Dipertajam

: Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan

: Cukup / ~~Belum~~ untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Helen Last Fitriani, SH, MH

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 30 September 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU : 04/F.I/PP.00.9/7906/2019

: Biasa

: 1 (satu) Proposal

: Memohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: DESI RATNA
NIM	: 11527203057
Jurusan	: Ilmu Hukum SI
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: UNIT PENGELOLA KEGIATAN MITRA MANDIRI KECAMATAN SUNGAI APIT

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN MITRA MANDIRI KECAMATAN SUNGAI APIT

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rector
Dean
Drs. H. Hajar., M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1005



1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarung mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tersusun :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/26272
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 001/PP.001/7906/2019 Tanggal 30 September 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : DESI RATNA
2. NIM / KTP : 11527203057
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN MITRA MANDIRI KECAMATAN SUNGAI APIT
7. Lokasi Penelitian : UNIT PENGELOLA KEGIATAN MITRA MANDIRI KECAMATAN SUNGAI APIT

Sejalan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Sjak Sri Indrapura
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/ Rumah Dinas Jabatan Blok. II
SIAK SRI INDRAPURA

070/Kesbangpol/341

Rekomendasi Riset

Kepada:

Yth. Kepala Unit Pengelola Kegiatan Mitra
Mandiri Kecamatan Sungai Apit

di-

Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/26272 tanggal 1 Oktober 2019 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara ;

Nama : DESI RATNA
N M : 11527203057
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : "PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN MITRA MANDIRI KECAMATAN SUNGAI APIT".
Lokasi Penelitian : UNIT PENGELOLA KEGIATAN MITRA MANDIRI KECAMATAN SUNGAI APIT

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Riset/ Pra Riset yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini, dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 14 Oktober 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK
Kasi Kesatuan Bangsa


T. YUSNIZAR S.Sos
NIP. 19810613 200212 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Camat Sungai Apit
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
MITRA MANDIRI SUNGAI APIT
KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK**

13 /UPK/MM-SA/X1/2019

1 (satu) lembar

Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Uin Suska Riau

Di -

Tempat

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit, dengan ini

menyatakan bahwa:

Nama : DESI RATNA

Nim/KTP : 11527203057

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Pekanbaru

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit

Menyatakan benar nama tersebut di atas telah melakukan Riset / Pra Riset dan penelitian

pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Apit, 20 November 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Desi Ratna, lahir di Kota Sungai Apit pada tanggal 12 Desember 1996 merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Misnin dan Ibunda Nurhayati. Pada tahun 2003 penulis memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 016 Sungai Apit, lulus pada tahun 2009. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 1 Sungai Apit dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sungai Apit dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis meneruskan Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis.

Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 2 (dua) bulan di Kejaksaan Negeri Siak. Selain itu penulis juga ikut dalam beberapa organisasi internal kampus. Penulis juga pernah melaksanakan Kukerta di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wata'ala serta do'a dan dukungan orang-orang terdekat, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN MUTRA MANDIRI KECAMATAN SUNGAI APIT BERDASARKAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 414.2/ 1402/ PMD 11 AGUSTUS 2006 TENTANG KEBIJAKAN PELESTARIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN”** dibawah bimbingan Bapak Peri Pirmansyah, SH., MH. Berdasarkan hasil sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum pada Selasa tanggal 10 Maret 2020, penulis dinyatakan **LULUS** serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) .